

Desentralisasi fiskal dan kemiskinan regional di Jawa Timur

Fitri Awal Pasholihah*, Aminuddin Anwar

Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding author: 18313167@students.uui.ac.id

JEL Classification Code:

E01, E31, I32

Kata kunci:

Desentralisasi fiskal, Kemiskinan regional, Pembangunan manusia

Email penulis:

aminuddin.anwar@uui.ac.id

DOI:

10.20885/JKEK.vol2.iss1.art12

Abstract

Purpose – This study aims to analyze the effect of fiscal decentralization on poverty conditions in East Java.

Methods – This study conducted an analysis of districts/cities in East Java in the 2016 -2020 period using the panel data method.

Findings – The results of this study indicate that the Human Development Index has a negative effect, Population has a positive effect, and Fiscal Decentralization has a negative effect on Regional Poverty in East Java.

Implication – The implications of the results of this study indicate that the government should be able to provide health and education facilities to improve the human development index better, an increase in population will slow down economic development and the government increases development with the aim of equitable income for all groups of people.

Originality – This research contributes to implementing a study of poverty and its factors in East Java using a Panel Data approach.

Abstrak

Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari desentralisasi fiskal terhadap kondisi kemiskinan di Jawa Timur.

Metode – Penelitian ini melakukan analisis pada kabupaten/kota di Jawa Timur pada periode 2016 -2020 dengan menggunakan metode panel data.

Temuan – Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif, Jumlah Penduduk berpengaruh positif, dan Desentralisasi Fiskal berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan Regional di Jawa Timur.

Implikasi – Implikasi dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah hendaknya mampu memberikan fasilitas kesehatan dan pendidikan untuk memperbaiki indeks pembangunan manusia yang lebih baik, peningkatan jumlah penduduk akan dapat memperlambat pembangunan ekonomi dan pemerintah meningkatkan pembangunan dengan tujuan untuk pendapatan yang merata untuk seluruh golongan masyarakat.

Orisinalitas – Penelitian ini berkontribusi dalam implementasi teori kemiskinan dan faktornya di Jawa Timur menggunakan pendekatan Panel Data.

Pendahuluan

Kemiskinan menjadi masalah global yang dihadapi berbagai negara di dunia. Oleh karena itu, semua negara memperhatikan masalah ini (Todaro et al., 2000). Menurut (Nugroho dan Dahuri, 2004) kemiskinan diartikan sebagai kondisi yang absolut dan relatif di suatu daerah yang menjadi penyebab masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar sesuai norma-norma yang berlaku

di lingkungan masyarakat karena faktor alamiah (*naturale*), budaya (*culture*), maupun struktural (*structure*). Adapun terdapat 2 sisi kemiskinan yaitu: Pertama, kemiskinan absolut yaitu mendeskripsikan jumlah penduduk yang masih hidup berada di bawah garis kemiskinan tertentu. Kemiskinan absolut terjadi di mana kondisi lemahnya seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok standar minimum. Kedua, kemiskinan relatif yakni di mana pangsa untuk pendapatan secara nasional diterima oleh masing-masing golongan berpendapatan. Selain itu, kemiskinan relatif berada pada kondisi ketidakmampuan mencapai standar hidup yang dilaksanakan masyarakat setempat dan berkaitan erat dengan masalah distribusi pendapatan (Hapsoro & Gunanto, 2013).

Berdasarkan fakta, saat ini dapat dilihat kemiskinan di Indonesia masih berada di bawah laju kondisi normal sebelum maupun setelah terjadi pandemi. Menurut data dari (BPS, 2020) melaporkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,55 juta jiwa. Hal ini dapat dikatakan kemiskinan di Indonesia terbilang cukup tinggi. Tingkat keparahan kemiskinan dapat diukur dengan melihat jumlah penduduk miskin yang cukup besar. Salah satu faktor penyebab tingginya jumlah penduduk miskin melalui kondisi investasi, tingkat pengangguran, serta rendahnya pertumbuhan ekonomi. Upaya dalam pengentasan kemiskinan, salah satunya dapat dilakukan secara terpadu dan menyeluruh dari segala aspek kehidupan ikut terlibat serta elemen baik negara maupun masyarakat untuk siap dalam pemulihan ekonomi (Cholili, 2013).

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berada di sebelah timur Pulau Jawa. Jawa Timur mempunyai luas wilayah sekitar 47.799,75 Km atau setara 2.498 km² luas wilayah Indonesia. Provinsi ini merupakan wilayah terluas di Pulau Jawa di antara 6 provinsi yang memiliki jumlah penduduk tertinggi kedua yaitu sebesar 39,74% setelah Provinsi Jawa Barat. Jawa Timur memiliki 38 kabupaten/kota terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota yang tersebar di provinsi ini. Jumlah penduduk yang semakin meningkat menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur meningkat pula. Menurut data pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mampu mencapai 5,52% lebih tinggi dibandingkan pendapatan nasional. Jawa Timur menempati posisi pertama penduduk miskin terbanyak sebesar 4.292.150 jiwa. Setiap Provinsi memiliki banyak program akses, fasilitas dan sarana prasarana yang memadai untuk keberlangsungan hidup, namun permasalahan kemiskinan telah menjadi bumerang bagi suatu daerah. Berikut data yang menunjukkan jumlah penduduk miskin yang tersebar di Pulau Jawa.

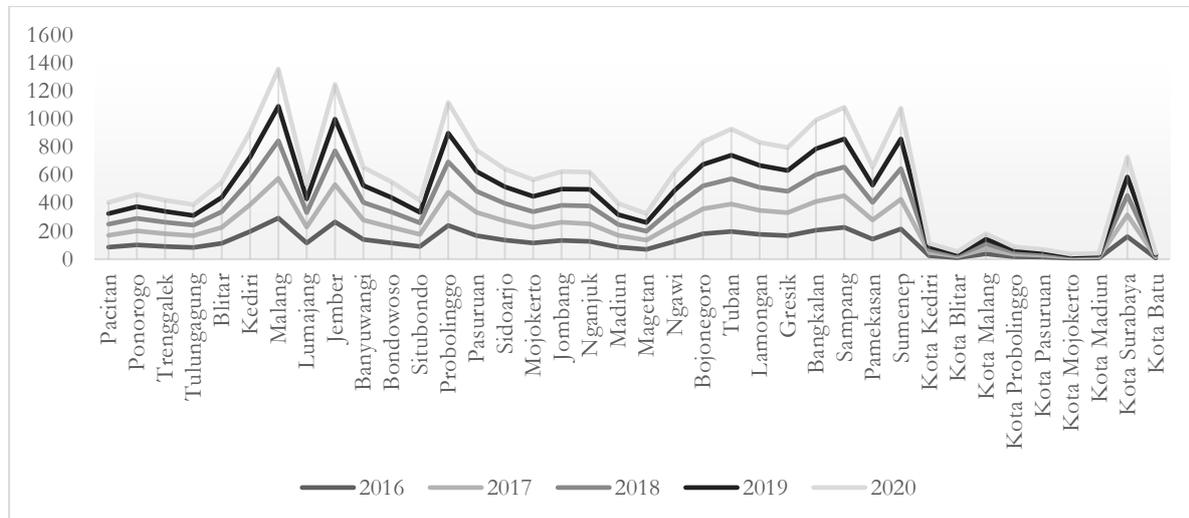
Tabel 1. Kemiskinan Antar Provinsi di Pulau Jawa

Tahun	Provinsi					
	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DIY	Jawa Timur	Banten
2016	384.3	4.224,3	4.506.89	494.94	4703.30	658.11
2017	389.69	4.168,44	4.450.72	488.53	4 617.01	675.04
2018	373.12	3.615,79	3,897.20	460.1	4 332.29	661.36
2019	365.55	3.399,16	3,743.23	448.47	4 112.25	654.46
2020	480.86	3.920,23	3 980.90	475.72	4 419.10	775.99

Tabel 1. menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin menyebar di Pulau Jawa khususnya di 6 Provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur dan Banten dari tahun 2016 sampai 2020. Beberapa wilayah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak dan Provinsi Jawa Timur menempati urutan pertama. Kemiskinan yang ada di Jawa Timur tahun 2016 sampai 2020 mengalami fluktuatif meskipun cenderung menurun signifikan setiap tahunnya. Akibat adanya pandemi covid-19 awal tahun 2020 menyebabkan kemiskinan di Jawa Timur kembali naik 11,09% sebelumnya turun secara signifikan di tahun 2019.

Berdasarkan data menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang sangat ekstrim, hal ini disebabkan adanya pandemi covid yang sangat tinggi dan semakin gencar memengaruhi segala aspek perekonomian termasuk jumlah penduduk miskin yang melonjak dan tingginya tingkat pengangguran pada saat itu. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya di tahun 2016 sampai 2019 jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan yang fluktuatif tetapi tidak banyak. Menurut data dilaporkan bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur per bulan September tahun 2020 tercatat ada sebanyak 4. 585,97 ribu jiwa atau dalam persentase 11,46%. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 166,9 ribu jiwa

dibandingkan pada Maret 2020 yang sebelumnya sebesar 4.419,10 ribu jiwa atau 11,09 persen. Jumlah penduduk yang semakin tinggi akan dapat menyebabkan permasalahan penduduk seperti kriminalitas yang merajalela. Dengan demikian, pemerintah memiliki tugas cukup besar dan perlu bergerak cepat untuk mengatasi adanya ledakan jumlah penduduk miskin di suatu daerah yang berdampak pada melambatnya laju percepatan ekonomi di suatu wilayah.



Gambar 1. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Jawa Timur Jawa 2016-2020

Desentralisasi fiskal merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah wilayah kabupaten/kota untuk mengawasi keuangannya sendiri secara langsung seperti, menyidik berbagai sumber pendapatan daerah dan menentukan prioritas biaya dalam pembangunan daerah. Di samping itu, pemerintah pusat juga memiliki wewenang yang semakin luas dalam mengelola potensi wilayah daerah sebagai pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, dalam pengelolaan pemerintahan desentralisasi fiskal mampu memberikan kemandirian pada daerah. Menurut (William dan Vyasulu, 2004) menjelaskan bahwa dengan desentralisasi fiskal mampu mengurangi kemiskinan menuju ke arah perubahan yang lebih baik dari segi struktur politik dan sikap sosial antara pemerintah terhadap penduduk miskin. Wilayah kabupaten/kota provinsi Jawa Timur sebagai daerah yang mampu menunjukkan performa keuangan daerah yang cukup baik pada era desentralisasi fiskal, dengan ditunjukkan kemampuan daerah yang mampu mencapai proporsi pendapatan asli daerah yang tinggi di atas batas rata-rata secara nasional.

Kajian awal yang terkait dengan kemiskinan dilakukan oleh Afandi, et al. (2017) yang menganalisis kondisi kemiskinan di Indonesia dengan metode time series yang menunjukkan bahwa inflasi dan investasi menjadi factor utama yang mempengaruhi kemiskinan. Penelitian lain oleh Sriyana (2018) di Jawa Tengah menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi regional, tingkat upah dan pengangguran menjadi factor utama yang dapat menurunkan kemiskinan regional di Jawa Tengah. Penelitian yang dilakukan oleh (Romi, S., & Umiyati, 2018) menjelaskan bahwa aspek utama dalam menilai kinerja dalam perekonomian dan menganalisis proses pembangunan ekonomi di suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Sedangkan hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Aryana dan Finkayana (2016) menjelaskan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali dalam jangka waktu 2004-2013.

Penelitian yang dilakukan oleh Sholikhin (2021), menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh negative terhadap persentase penduduk miskin, jumlah penduduk berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap persentase penduduk miskin, produk domestik regional bruto berpengaruh negatif terhadap persentase penduduk miskin dan dampak adanya pandemi covid-19 berpengaruh positif terhadap persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian yang dilakukan oleh (Sholikhati, 2020) di Jawa Tengah menunjukkan bahwa PDRB dan IPM berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, dan jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Menurut Isnaini dan Nugroho (2020), di Jawa Timur menganalisis

tentang pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), angkatan kerja, dan APBD terhadap kemiskinan menunjukkan bahwa PDRB dan APBD berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

Penelitian oleh Abdillah dan Mursianto (2016), menjelaskan bahwa di Indonesia otonomi daerah merupakan bagian bentuk dari proses desentralisasi untuk membangun kabupaten dan kota sebagai daerah otonom di Indonesia menunjukkan bahwa pertama dalam jangka pendek desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan sedangkan ketimpangan pendapatan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan daerah. Dalam jangka panjang, desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan negatif pada tingkat kemiskinan daerah. Penelitian oleh lain oleh Laraswati, (2017) di Jawa Timur menunjukkan bahwa baik secara simultan maupun parsial variabel desentralisasi fiskal, pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan penduduk memiliki hubungan negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2015. Penelitian lain yang menganalisis determinan yang memengaruhi tingkat kemiskinan di Jawa Tengah dilakukan oleh (Faritz dan Soejoto, 2020) terkait pengaruh pertumbuhan ekonomi dan rata-rata lama sekolah terhadap kemiskinan menunjukkan bahwa kedua factor tersebut memiliki pengaruh negative terhadap kemiskinan, sementara itu Sari (2021), menganalisis pengaruh upah, pengangguran dan jumlah penduduk yang menyimpulkan bahwa upah minimum regional berpengaruh negative serta pengangguran dan jumlah penduduk memiliki pengaruh positif.

Salah satu provinsi dengan kabupaten/kota terbanyak di Indonesia, Jawa Timur memiliki potensi sumber daya terbesar dengan nilai pendapatan daerah yang semakin meningkat di setiap tahunnya. Desentralisasi fiskal akan memberikan dampak positif dalam mengurangi jumlah penduduk miskin apabila disertai meningkatnya pendapatan daerah kabupaten/kota. Selain itu, dengan desentralisasi fiskal mampu menjadi pendorong prospek pertumbuhan ekonomi di daerah otonom. Melalui sistem otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk bertanggung jawab pada sumber anggaran oleh pemerintah pusat sebagai pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, besarnya dukungan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan alokasi pada sumber dana tersebut ke proporsi belanja sesuai kebutuhan utama daerah, sehingga semakin berhasil daerah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan pembangunan daerah yang inklusif.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif karena dalam bentuk bilangan atau angka. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian adalah gabungan antara data *cross section* sebanyak 38 kabupaten/kota atau terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota di Provinsi Jawa Timur dengan data *time-series* selama 5 tahun dari tahun 2016 sampai 2020. Data yang digunakan adalah laju pertumbuhan produk domestik regional bruto, jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia dan desentralisasi fiskal di provinsi Jawa Timur terhadap tingkat kemiskinan regional di Jawa Timur. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kemiskinan, sedangkan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Jumlah Penduduk dan Desentralisasi Fiskal. Secara detail definisi lebih lanjut dari per masing-masing variabel dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Simbol	Definisi	Satuan
Kemiskinan	Pov	Jumlah penduduk miskin di setiap kabupaten dan kota.	Jiwa
Laju PDRB	LjPDRB	PDRB atas harga konstan dibagi dengan jumlah penduduk	Persen
IPM	IPM	Gambaran kualitas kehidupan masyarakat yang terdiri dari komponen seperti angka harapan hidup, angka partisipasi sekolah, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf dan rata-rata pengeluaran per kapita atau kebutuhan dasar masyarakat.	Persen
Jumlah Penduduk	JP	Total jumlah penduduk di setiap kabupaten dan kota.	Jiwa
Desentralisasi Fiskal	DF	Kontribusi selisih dari jumlah pendapatan asli daerah di setiap wilayah masing-masing dengan total pendapatan daerah.	Persen

Penelitian ini menggunakan model Panel Data yang menganalisis data pada kurun waktu 2016-2020 dengan model sebagai berikut:

$$Pov_{it} = \beta_0 + \beta_1 LJPDRB_{it} + \beta_2 IPM_{it} + \beta_3 JP_{it} + \beta_4 DF_{it} + e_{it} \quad (1)$$

Estimasi data panel dilakukan dengan 3 pendekatan yang dapat dilakukan yakni *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model* dan *Random effect Model*. Pendekatan *Common Effect Model* (CEM) adalah metode yang sangat sederhana untuk mengestimasi data di mana pada model ini hanya melibatkan antara data *time series* dengan *cross section* tanpa mengacu pada waktu dan individu berdasarkan data yang sama dari segi kurun waktu. Untuk estimasi pada model ini dapat dilakukan dengan *Ordinary Least Square* (OLS), namun model ini terdapat kekurangan yakni tidak dapat membedakan varian antara *time series* dengan *crosssection* karena memiliki nilai intercept yang sama. Pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) adalah suatu model yang disebut model tetap. Sehingga, ketika mengestimasi akan melibatkan variabel dummy di mana *slope* akan menjadi asumsi tetap. Sedangkan untuk hasil *intercept* tidak akan sama karena perbedaan individu dan kurun waktu. Variabel dummy atau *Least Square Dummy Variable* (LSDM) berfungsi sebagai sesuatu yang dapat melacak setiap perbedaan pada individu dan kurun waktu suatu data. Tujuan dilakukan pembobotan adalah untuk menghindari penyakit heterogenitas pada data antar unit *cross section*, namun kekurangan pada model ini adalah berkurangnya derajat kebebasan (*degree of freedom*) sehingga akan mengurangi efisiensi parameter. Pendekatan *Random Effect Model* (REM) muncul sebagai pelengkap yang melibatkan variabel gangguan (*error term*), di mana ada hubungan antar kabupaten/kota dan kurun waktu. Sehingga, model ini memungkinkan dapat menghapus heteroskedastisitas. Pada model ini dapat disebut juga sebagai *Generalized Least Square* (GLS) atau *Error Component Model* (ECM).

Pemilihan model pada data panel mempertimbangkan beberapa hal terkait dengan model statistik untuk memperoleh hipotesis yang tepat dan efisien, sehingga diperlukan pengujian yaitu Uji Chow (*Chow Test*), Uji Lagrange Multiplier (*Lagrange Multiplier Test*), dan Uji Hausman (*Hausman Test*). Uji Chow merupakan uji yang digunakan untuk memilih metode yang terbaik serta menyesuaikan data dari hasil uji *common effect model* dan *fixed effect model*. Uji lagrange multiplier adalah uji yang digunakan untuk memilih metode yang terbaik serta menyesuaikan data dari hasil uji *Random effect model* dan *Common effect model* (OLS). Uji Hausman merupakan uji yang digunakan untuk memilih metode yang terbaik serta menyesuaikan data dari hasil uji *random effect model* dan *fixed effect model*.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis deskriptif yang diperoleh menunjukkan bahwa untuk variabel laju pertumbuhan produk domestik regional bruto memiliki nilai *mean* sebesar 3.735 dengan nilai standar deviasi sebesar 3.643. Variabel indeks pembangunan manusia memiliki nilai *mean* sebesar 70.931 dengan standar deviasi sebesar 5.157, kemudian untuk variabel jumlah penduduk dengan nilai *mean* 2033162 dan standar deviasi sebesar 6152286. Sementara untuk variabel bebas lainnya yaitu desentralisasi fiskal memiliki nilai *mean* 16.507 dengan nilai standar deviasi sebesar 10.582. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi data pada periode penelitian ini hasil analisis deskriptif tidak ada data yang memiliki karakteristik lain yang sangat jauh berbeda dari nilai *mean*, *minimum* dan *maximum*.

Tabel 3. Hasil Analisis Deskriptif

Variabel	Obs	Mean	Stand. Dev.	Max	Min
Kemiskinan	195	227.042	689.086	4703.300	6.630
Laju PDRB	195	3.735	3.643	21.950	-6.460
IPM	195	70.931	5.157	82.230	59.090
Jumlah Penduduk	195	2033162	6152286	40665696	126404.0
Desentralisasi Fiskal	195	16.507	10.582	64.250	1.360

Menurut penelitian sebelumnya oleh (Anwar, 2017) bahwa data yang dihasilkan dari uji analisis deskriptif adalah menunjukkan apakah terdapat data yang menyimpang dari suatu rangkaian data (*outliers*) serta menganalisis terdapat data yang bias terhadap masing-masing variabel, sehingga

akan menyebabkan ketidaksesuaian dengan fenomena yang sebenarnya terjadi. Oleh karena itu, berdasarkan hasil analisis deskriptif yang dilakukan pada data dapat mempresentasikan hasil analisis dari penelitian ini.

Tabel 4. Hasil Estimasi *Common Effect*, *Fixed Effect*, dan *Random Effect Model*

Variabel	Common Effect Model		Fixed Effect Model		Random Effect Model	
	Coeff.	Prob.	Coeff.	Prob.	Coeff.	Prob.
C	246.955	0.000	135.960	0.004	170.797	0.000
LJPDRB	-0.573	0.447	0.024	0.958	-0.073	0.872
IPM	-2.910	0.000	-1.449	0.029	-1.919	0.001
JP	0.0001	0.000	0.0001	0.000	0.0001	0.000
DF	-2.972	0.000	-2.723	0.000	-2.782	0.000
R-squared	0.988		0.997		0.995	
Adjust R-square	0.988		0.996		0.995	
F-Statistic	3782.671		1070.39		8996.127	
Prob. F-Statistic	0.000		0.000		0.000	

Setelah melakukan analisis deskriptif dilakukan, analisis selanjutnya dilakukan dengan melakukan estimasi regresi data panel dengan menggunakan metode terbaik yaitu dengan memilih metode *common effect model*, *fixed effect model*, maupun *random effect model*. Adapun hasil yang diperoleh dari ketiga model pengujian tersebut ditunjukkan pada table 4.

Tabel 5. Hasil Uji Chow, Hausman dan Lagrange Multiplier

Chow Test			
Effect Test	Statistic	d.f	Prob.
Cross-section F	10.375	(37,148)	0.000
Cross-section Chi-square	243.053	37	0.000
Hausman Test			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chis-Sq. d.f	Prob.
Cross-section random	6.422	4	0.170
Lagrange Multiplier Test			
	Cross-section	Time	Both
Breusch- Pagan	149.834 (0.000)	0.013 (0.921)	149.847 (0.000)

Langkah awal dalam proses pemilihan model adalah melakukan Uji Chow (Chow Test) merupakan pengujian yang dilakukan untuk memilih metode yang lebih baik dan tepat antara *Common effect model* dan model *fixed effect model* dengan melihat nilai prob F dan alpha (α). Hasil pengujian oleh uji Chow (Chow Test) menunjukkan bahwa nilai prob *cross-section* F sebesar 0.000 lebih kecil dari alpha (α) = 5% ($0.000 < 0.05$) maka secara hipotesis H_0 ditolak. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa model yang lebih baik dan tepat untuk pengujian hipotesis adalah model *fixed effect model*. Selanjutnya dilakukan Uji Lagrange Multiple (*Lagrange Multiple Test*) merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah model yang tepat *random effect* atau *common effect* yang digunakan dalam penelitian ini dengan melihat nilai *cross section* pada *Breusch-Pagan* dan nilai alpha (α). Berdasarkan hasil regresi yang diperoleh dari Uji *Multiple Lagrange* menunjukkan bahwa nilai distribusi pada *Cross section* sebesar 149.834 dengan nilai probabilitas sebesar 0.000 di mana hasil tersebut lebih kecil dari alpha (α) 5% atau ($0.000 < 0.05$), sehingga dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa model yang terbaik dan tepat dalam penelitian ini adalah *random effect model*. Langkah terakhir adalah melakukan Uji Hausman (Hausman Test) merupakan pengujian yang dilakukan untuk memilih metode antara *fixed effect* atau *random effect* dengan melihat nilai probabilitas dan nilai alpha (α). Berdasarkan hasil regresi yang diperoleh dari Uji Hausman menunjukkan bahwa nilai distribusi pada *Chi-square Statistic* sebesar 6.422 dengan nilai probabilitas *Chi-square* sebesar 0.170 di mana hasil tersebut lebih besar dari alpha (α) 5% atau ($0.1670 > 0.05$), sehingga dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa model yang terbaik dan tepat dalam penelitian ini adalah *random effect model*.

Tabel 6. Hasil Regresi Terbaik *Random Effect Model*

Variabel	Random Effect Model			
	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	170.797	40.924	4.173	0.000
LJPDRB	-0.073	0.456	-0.161	1.872
IPM	-1.919	0.581	-3.304	0.0011
JP	0.0001	6.65E-07	182.741	0.000
DF	-2.782	0.252	-11.042	0.000
R-squared	0.995	Prob. F-statistic		0.000
Adjusted R-squared	0.995	S.D. dependent var		130.398
F-statistic	8996.127	Durbin-Watson stat		1.280

Hasil regresi terpilih yang tepat dan terbaik berdasarkan hasil uji pemilihan model untuk penelitian ini adalah model *Random Effect Model*. Hasil untuk Laju pertumbuhan produk domestik regional bruto (LJPDRB) pada penelitian ini memiliki nilai probabilitas sebesar $1.872 > 0.05$ dalam tingkat 5%, dengan nilai koefisien regresi sebesar -0.073 . Hal ini menunjukkan bahwa variabel laju pertumbuhan produk domestik regional mempunyai pengaruh negatif dan secara tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan regional di kabupaten/kota Jawa Timur. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Afandi et al. (2017) yang menunjukkan bahwa PDRB tidak memiliki pengaruh terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia. Penurunan tingkat kemiskinan dapat dikatakan berhasil apabila memiliki syarat kecukupan salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi yang efektif. Dengan demikian, perekonomian yang baik dan merata di setiap sudut golongan pendapatan termasuk masyarakat miskin dapat terjadi di semua sektor khususnya pertanian dan padat karya baik secara langsung maupun tidak langsung. Upaya pemerintah yang cukup efektif dalam menekan angka kemiskinan di suatu daerah dengan laju pertumbuhan produk domestik regional bruto yang tinggi.

Hasil untuk variabel Indeks pembangunan manusia (IPM) dalam penelitian ini dengan nilai probabilitas sebesar $0.0011 < 0.05$ dalam signifikan 5%, dengan nilai koefisien regresi sebesar -1.919 . Hal ini menunjukkan bahwa variabel indeks pembangunan manusia mempunyai pengaruh negatif dan secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan regional di kabupaten/kota Jawa Timur. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh (Sholikhin, 2021) menjelaskan bahwa indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh secara negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Peningkatan indeks pembangunan manusia yang semakin baik akan memberikan dampak pada penyerapan sumber daya yang berkualitas, sehingga akan menciptakan produktivitas kerja yang baik bagi perusahaan atau instansi lainnya. Di samping itu, perkembangan indeks pembangunan manusia tidak terlepas dari masalah yang akan dihadapi seperti rendahnya sarana pendidikan dan kesehatan yang akan menimbulkan kemiskinan di suatu daerah semakin meningkat sebab kurangnya intervensi dan perhatian dari pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan yang tepat sasaran untuk menurunkan jumlah penduduk miskin melalui kebijakan gratis biaya sekolah dan biaya perawatan kesehatan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu.

Hasil untuk variabel Jumlah penduduk (JP) menunjukkan bahwa dengan nilai probabilitas sebesar $0.0000 < 0.05$ dalam signifikan 5%, dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.0001 . Hal ini menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk mempunyai pengaruh positif dan secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan regional di kabupaten/kota Jawa Timur. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya oleh Sari (2021) di Jawa Tengah yang menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk memiliki pengaruh positif terhadap kondisi kemiskinan. Berdasarkan kepadatan penduduk yang semakin pesat hal ini tidak ada unsur kesengajaan atau alasan lain, karena fenomena ini tumbuh secara tidak terkendali, sehingga akan berdampak pada pembangunan di masing-masing daerah akan terhambat dan muncul ketidaksejahteraan masyarakat. Selain itu, dampak buruk dari kepadatan penduduk yang terlampaui tinggi akan berpengaruh pada tingkat sumber daya yang terbatas dan produktivitas yang rendah dan diiringi dengan upah kerja yang sedikit. Oleh karena itu, dengan menekan jumlah penduduk yang stabil dapat menurunkan tingkat kemiskinan yang cenderung tinggi.

Hasil untuk variabel desentralisasi Fiskal (DF) merupakan variabel independen keempat dalam penelitian ini dengan nilai probabilitas sebesar $0.000 < 0.05$ dalam signifikan 5%, dengan nilai koefisien regresi sebesar -2.782. Hal ini menunjukkan bahwa variabel desentralisasi fiskal memiliki pengaruh negatif dan secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan regional di kabupaten/kota Jawa Timur. Penelitian ini selaras dengan penelitian sebelumnya oleh (Hutabarat, 2016) menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal memiliki pengaruh negatif dan secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian selanjutnya oleh (Laraswati, 2017) bahwa secara parsial dan simultan desentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2010 sampai 2015. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin daerah memiliki kemandirian dalam mengelola anggaran untuk daerahnya sendiri maka akan semakin baik dalam memperbaiki pembangunan ekonomi dan akhirnya akan dapat menekan jumlah penduduk miskin yang semakin meningkat. Kebebasan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam membangun berbagai sektor di suatu daerah merupakan peluang yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat mengurangi jumlah penduduk yang masih tertinggal oleh lingkungan sekitar. Penanggulangan masyarakat yang tertinggal baik dari segi ekonomi maupun sosial pemerintah diharapkan selalu tanggap akan kebutuhan masyarakat untuk mempercepat pembangunan yang tepat sasaran demi kesejahteraan yang lebih baik.

Kesimpulan dan Implikasi

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa laju pertumbuhan produk domestik regional bruto tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan regional di Jawa Timur tahun 2016 sampai 2020. Indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan regional di Jawa Timur tahun 2016 sampai 2020. Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan regional di Jawa Timur tahun 2016 sampai 2020. Desentralisasi fiskal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan regional di Jawa Timur tahun 2016 sampai 2020.

Hasil penelitian diperoleh bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan regional di Jawa Timur tahun 2016 sampai 2020. Dengan demikian, semakin baik pembangunan manusia dalam menunjang seluruh perekonomian, maka akan semakin berhasil dalam mengurangi jumlah penduduk miskin. Hal ini menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia merupakan aspek penting untuk menciptakan sumber daya yang berkualitas dan berintegritas tinggi dalam memperbaiki standar hidup yang lebih layak. Oleh karena itu, pemerintah hendaknya mampu memberikan fasilitas yang memadai seperti kesehatan dan pendidikan untuk memperbaiki indeks pembangunan manusia yang lebih baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh positif dan secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan regional di Jawa Timur tahun 2016 sampai 2020. Kepadatan penduduk yang meningkat maka akan berpengaruh pada tingkat kemiskinan yang semakin bertambah pula. Jumlah penduduk yang semakin pesat akan dapat memengaruhi jumlah sumber daya alam yang tersedia, sehingga seiring bertambahnya penduduk yang tidak terkendali maka akan menyebabkan persediaan sumber pangan cenderung sedikit dan langka. Selain itu, peningkatan jumlah penduduk akan dapat memperlambat pembangunan ekonomi dan mempersulit pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan dalam masalah pembangunan di masing-masing daerah.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa desentralisasi fiskal memiliki pengaruh negatif dan secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan regional di Jawa Timur tahun 2016 sampai 2020. Artinya, apabila suatu wilayah semakin mandiri dalam pengelolaan anggaran dari pemerintah pusat dan tidak bergantung pada keuangan yang ditujukan untuk memperbaiki pembangunan daerah maka akan mengurangi laju pertumbuhan ekonomi regional serta kemiskinan akan cenderung menurun sebab kontribusi dana untuk daerah lebih besar dalam mengalokasikan pembangunan. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah pusat dan khususnya pemerintah daerah dapat berupaya meningkatkan pembangunan dengan tujuan untuk pendapatan yang merata seperti hasil panen maupun hasil ekonomi lainnya untuk seluruh golongan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abdillah, K. dan Mursianto, D. (2016). The Effects of Fiscal Decentralisation, Economic Growth and Income Inequality on Poverty Rate of Indonesia's 3 Provinces. *International Journal of Advanced Research*, 4(2), 405–414.
- Afandi, Akhsyim. Wahyuni, Dwi. & Sriyana, Jaka. (2017). Policies to Eliminate Poverty Rate in Indonesia. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(1), 435-441.
- Anwar, A. (2017). The Role of Human Capital Toward Regional Economic Growth in Java. *Jurnal Economia*, 13(1), 79-94.
- Arya, P. & Finkayana, I. P. A. (2016). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Indikator Impisit IPM Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Bali Tahun 2004-2013. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 5(7).
- Cholili, F. M. (2013). Analisis Pengaruh Pengangguran, PDRB dan IPM terhadap Jumlah Penduduk Miskin (studi kasus: 33 Provinsi di Indonesia). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 2(1).
- Faritz, Miftaqh Nur. & Soejoto, Ady. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol.08 (01), 15-21.
- Hapsoro, D. N. Y., & Gunanto. (2013). Analisis Pengaruh Variabel Makroekonomi Regional Terhadap Tingkat Kemiskinan Perkotaan (Studi Kasus 44 Kota di Indonesia Tahun 2007-2010). *Diponegoro Journal of Economics*, 2(2), 1-12.
- Laraswati, R. (2017). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Timur Tahun 2010-2015. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*.
- Nugroho, I., & Dahuri, R. (2004). *Pengembangan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Pustaka LP3ES Jakarta.
- Romi, S., & Umiyati, E. (2018). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan upah minimum terhadap kemiskinan di Kota Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 7(1). pp.1–7.
- Sari, Yulia Adela. (2021). Pengaruh Upah Minimum Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *Equilibrium* Vol. 10 (2), Hal 121 – 130.
- Sholikhati, M. E. (2020). Analisis PDRB, IPM, Jumlah Penduduk, Pengangguran, Investasi PMA Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah 2011-2016. *Edusaintek*, 4.
- Sholikhin, S. (2021). The Factors Affecting Poverty Rate in Central Java Province 2018-2020. *Eko-Regional: Jurnal Pembangunan Ekonomi Wilayah*, 16(2).
- Sriyana, Jaka. (2018). Reducing Regional Poverty Rate in Central Java. *Jejak* Vol 11 (1), 1-11. DOI: <https://doi.org/10.15294/jejak.v11i1.13272>
- Todaro, M. P. dan S. C. S. (2004). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi kedelapan*. Jakarta: Erlangga.
- William McCarten & Vinod Vyasulu. (2004). Democratic decentralisation and poverty reduction in Madhya Pradesh: searching for an institutional equilibrium, *Development in Practice*, 14:6, 733-740, DOI: [10.1080/0961452042000283969](https://doi.org/10.1080/0961452042000283969)